

**PEMERATAAN PEMBANGUNAN BERBASIS WILAYAH KECAMATAN  
(Studi Pada Kecamatan Pulau Pisang Dan Kecamatan Pesisir Selatan  
Kabupaten Pesisir Barat)**

**Oleh:**

Allif Panszha Riadi



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

## **ABSTRAK**

### **PEMERATAAN PEMBANGUNAN BERBASIS WILAYAH KECAMATAN (Studi Pada Kecamatan Pulau Pisang dan Kecamatan Pesisir Selatan Di Kabupaten Pesisir Barat)**

**Oleh**

**Allif Panszha Riadi**

Kabupaten Pesisir Barat adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung dan merupakan daerah tertinggal. Ada 11 Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat namun pembangunan di Pesisir Barat tidak merata terutama pada layanan dasar. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui penyebab terjadinya kesenjangan pembangunan layanan dasar di Kecamatan Pesisir Selatan dan Kecamatan Pulau Pisang. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pertama pada RPJMD Kabupaten Pesisir Barat belum tercermin adanya pemerataan pembangunan, begitu juga dalam APBD Pesisir Barat 2020 tidak terlihat aspek keadilannya bagi masyarakat Pulau Pisang. Kedua skala prioritas dalam pelaksanaan pembangunan tidak terlihat, padahal Kecamatan Pulau Pisang termasuk daerah terluar yang harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah. Usul-usul yang disampaikan melalui Musrenbang Kecamatan Pulau Pisang tidak mendapat perhatian.

**Kata Kunci : Pemerataan Pembangunan, Layanan Dasar, Implementasi Kebijakan**

## **ABSTRACT**

### **EQUALITY OF REGION-BASED DEVELOPMENT IN DISTRICT (Study in Pulau Pisang Subdistrict and Pesisir Selatan District in Pesisir Barat Regency)**

**By**

**Allif Panszha Riadi**

Pesisir Barat Regency is one of the regencies in Lampung Province and is an underdeveloped area. There are 11 sub-districts in Pesisir Barat Regency but development in Pesisir Barat is uneven, especially in basic services. This study aims to determine the cause of the gap in basic service development in Pesisir Selatan District and Pulau Pisang District. This study uses a descriptive type of research with a qualitative approach. The results of this study are that the first RPJMD of Pesisir Barat Regency has not reflected the existence of equitable development, as well as in the 2020 West Coast Regional Budget, there is no visible aspect of justice for the people of Pisang Island. The two priority scales in the implementation of development are not visible, even though Pulau Pisang Subdistrict is the outermost area that must receive special attention from the regional government. The proposals submitted through the Musrenbang in Pulau Pisang sub-district did not receive any attention.

**Keywords: Equitable Development, Basic Service, Policy Implementation Implementasi**

**PEMERATAAN PEMBANGUNAN BERBASIS WILAYAH KECAMATAN  
(Studi Pada Kecamatan Pulau Pisang Dan Kecamatan Pesisir Selatan  
Kabupaten Pesisir Barat)**

**Oleh**

**Allif PanszhaRiadi**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2021**

Judul Skripsi : **PEMERATAAN PEMBANGUNAN BERBASIS  
WILAYAH KECAMATAN (Studi Pada  
Kecamatan Pulau Pisang Dan Kecamatan Pesisir  
Selatan Kabupaten Pesisir Barat)**

Nama Mahasiswa : **Allif Panszha Riadi**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1646021021**

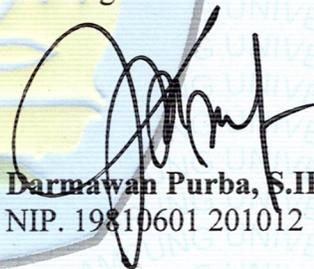
Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**

  
**Budi Harjo, S.Sos, M.IP.**  
NIP. 19680112 199802 1 001

  
**Darmawan Purba, S.IP, M.IP.**  
NIP. 19810601 201012 1 003

2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

  
**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**  
NIP. 19611218 198902 1 001

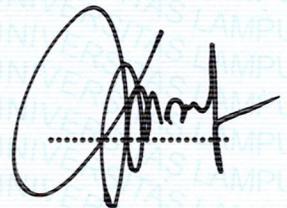
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

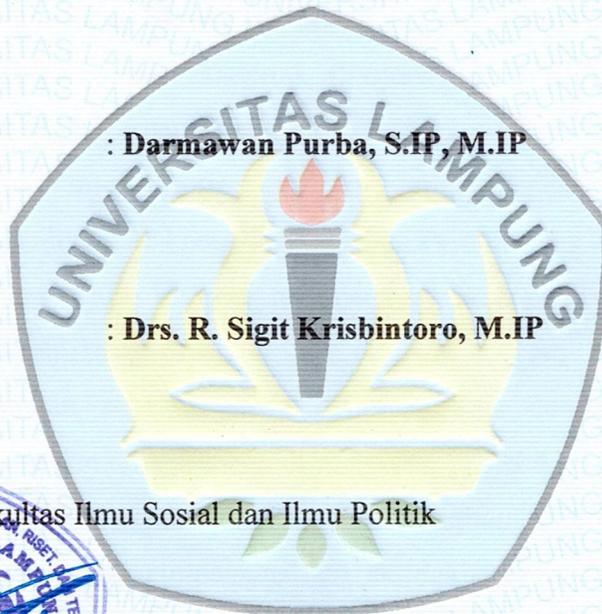
Ketua : **Budi Harjo, S.Sos, M.IP**



Sekretaris : **Darmawan Purba, S.IP, M.IP**



Penguji : **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si**  
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **09 Agustus 2021**

## PERNYATAAN

Dengan Ini Saya Menyatakan Bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung

Bandar Lampung, 09 Agustus 2021

**Yang Membuat Pernyataan**



**Allif Panszha Riadi**  
**NPM. 1646021021**

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama Allif Panszha Riadi dilahirkan di Kota Bumi, 20 Maret 1999. Penulis merupakan anak pertama dari 3 (Tiga) bersaudara putra dari Bapak Agus Triyadi dan Ibu Imelda. Jenjang pendidikan penulis dimulai di SDN 1 Sebarus tahun 2004-2010.

Penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Babakan Madang tahun 2010-

2013 dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMAS Indocement tahun 2013-2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung melalui jalur MANDIRI. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan tahun 2016.

Selama masa perkuliahan penulis pernah berhimpun dalam beberapa organisasi.

Penulis pernah menjadi Staff Komunikasi BEM FISIP UNILA tahun 2017- 2018, Sekertaris Biro Hubungan Luar HMJ Ilmu Pemerintahan tahun 2017-2018, dan diamanahkan menjadi Ketua Umum HMJ Ilmu Pemerintahan tahun 2018-2019.

Penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Tampang Muda, Kecamatan Pematang Sawah, Kabupaten Tanggamus dan juga telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) selama 30 hari di Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung

## **MOTTO**

**Untuk sampai kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan, maka harus melalui proses yang tidak bisa dijelaskan pula**

**(APR)**

## **PERSEMBAHAN**

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahilahirabbil'alamin, telah engkau Ridhai Ya Allah langkah hambaMu,  
Sehingga Skripsi ini pada akhirnya dapat diselesaikan waktu yang tepat.

Teriring Shalawat Serta Salam Kepada Nabi Muhammad SAW Semoga Kelak  
Skripsi ini dapat Memberikan Ilmu yang bermanfaat

dan

Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada :

“Kedua Orang TuaKu Tercinta”

“Abi dan Umi”

Terimakasih atas Doa Restu, Dukungan, Serta Cinta dan Kasih Sayang yang tiada  
habisnya untukKu sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik sebagai  
tanda bakti, sebagai seorang anak yang tak akan mampu membalas segala jasa dan  
kebaikan kalian.

“Untuk adik-adikKu”

“Aldellia Riadi, dan M. Yafi Jawad Riadi”

Terima kasih atas segala doa dan semangat yang telah kalian berikan.

Terima kasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan,  
semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

**Almamater Tercinta Universitas Lampung**

## SANWACANA

Bismillahirrahmanirrohim

Puji syukur atas keridhoan Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi kaumnya.

Skripsi yang berjudul “Pemerataan Pembangunan Berbasis Wilayah Kecamatan (Studi Pada Kecamatan Pulau Pisang Dan Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu :

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan dan selaku pembahas penulis. Terimakasih atas waktu dan saran yang telah diberikan kepada penulis selama proses

bimbingan. Semoga Allah SWT selalu melindungi setiap langkah Bapak dan semoga selalu di berikan kesehatan.

3. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.IP. Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, senior dan pembimbing 2 penulis, yang mengajarkan banyak hal selama perkuliahan.
4. Bapak Budi Harjo, S.Sos, M.IP. Selaku Dosen Pembimbing utama penulis yang telah banyak membantu selama proses bimbingan skripsi dari awal sampai terselesaikan nya skripsi ini, yang telah memberikan banyak waktu luangnya, memberikan banyak ilmu serta arahan nya dengan sabar kepada penulis. Penulis ucapkan banyak-banyak terimakasih kepada Bapak. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan untuk bapak, memberikan perlindungan disetiap langkah bapak dan memberikan kelancaran di setiap niat baik yang akan bapak lakukan.
5. Seluruh Dosen dan Staf Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terimakasih atas ilmu dan bantuan dalam hal pemberkasan. Terima kasih telah membantu penulis dalam masalah surat-menyurat. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesabaran.
6. Kedua orang tua ku yang sangat ku cintai, Umi dan Abi terimakasih atas segala doa, cinta dan kasih sayang nya, serta dukungan dan perhatiannya selama ini. Terima kasih telah mengajarkan banyak hal Umi Abi. Terimakasih atas kesabaran umi dan abi untuk menunggu dan mendoakan Allif. Semoga Allah SWT selalu melindungi setiap langkah perjalanan umi dan abi dan juga selalu memberikan kesehatan dan umur yang panjang untuk umi dan abi. Sekali lagi terima kasih ya Umi Abi atas segalanya, semoga Allif bisa membahagiakan umi dan abi kelak, serta menjadi anak yang  
berbakti.

7. Untuk teman-teman ku Bari Arla, Aziz Akbar, Feby Satria, Lanina Aprilia Kamil, Mia Nophita, Restita Amalia Putri, Ria Putri Wahyuni, Selvi Sancia, Tri Ayu Sartika Zanti juga tak lupa Anggria Yustika Ningtiyas, terimakasih untuk kalian. Terimakasih telah banyak membantu dengan porsi yang berbeda-beda di hidup dan di setiap langkah penulis. Terimakasih sudah menjadi teman yang bisa diandalkan yang selalu ada disetiap penulis membutuhkan bantuan. Terimakasih untuk waktu nya juga canda tawa yang diberikan kepada penulis. Terimakasih untuk canda dan tawa yang sering kali menghibur penulis. Semoga Allah melindungi setiap langkah kita dan semangat untuk kedepan nya.
8. Untuk Abang-abang dan Mba-mba ku, bang Anam, bang Vico, bang Darji, bang Tyas, bang Fadel, bang Hendra, bang Wisnu, bang Geo, bang Ade feri, bang rio, mba Shinta, mba Realita, mba Putri, mba Purnama, mba Alvi, mba Aca, dan mba Ismi. Terima kasih atas motivasi dan ilmu yang abang berikan. Terima kasih sudah banyak sekali membantu saya sedari maba sampai menyelesaikan skripsi ini yang memberikan bimbingan, arahan juga solusi dengan sabar dan Inshaallah Ikhlas. Sukses untuk kalian semua kating-kating kebanggaan ku. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kesehatan untuk kalian.
9. Adik-adik kebanggaan Ku, Reynaldo, Alek, Hayatami, Harjuno, Bangkit, Tio, Arben, Aldi, Kelvin, dan Abdi. Terimakasih telah menjadi adik yang baik di dunia Ilmu Pemerintahan. Untuk waktu canda dan tawa nya juga bantuan yang pernah kalian berikan

kepada penulis. Semangat untuk kalian semua, semangat sampai teraih nya gelar S.IP kalian.

10. Teman-teman Ilmu Pemerintahan angkatan 2016 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas kebersamaan di kelas selama perkuliahan. Semoga kita semua menjadi sukses dan di pertemukan di lain waktu dengan cerita dan kebahagiaan kita. Semangat untuk kita semua dan semangat menuju S.IP kawan-kawan.
11. Terimakasih untuk seluruh pengurus HMJ Ilmu Pemerintahan Periode 2018/2019 yang telah banyak memberikan pengalaman yang sangat berkesan dan tak terlupakan selama kepengurusan. Semoga kita selalu saling ingat walaupun tak saling bersapa. Sukses untuk kita

Bandar Lampung, 09 Agustus 2021

Allif Panszha Riadi

## DAFTAR ISI

|  | <b>Halaman</b> |
|--|----------------|
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>  | <b>iv</b>      |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>  | <b>v</b>       |
| <b>I. PENDAHULUAN</b>  |                |
| 1.1.Latar Belakang Masalah.....                                      | 01             |
| 1.2.Rumusan Masalah .....  | 08             |
| 1.3.Tujuan Penelitian.....   | 08             |
| 1.4.Manfaat Penelitian.....  | 09             |
| <b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>  |                |
| 2.1.Tinjauan Tentang Pembangunan dan Pemerataan<br>Pembangunan ..... | 10             |
| 2.1.1. Pembangunan .....   | 10             |
| 2.1.2. Pemerataan Pembangunan.....                                   | 11             |
| 2.2.Tinjauan Tentang Penyebab Kesenjangan Pembangunan.....           | 12             |
| 2.3.Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan.....                     | 13             |
| 2.3.1. Teori George C. Edward III.....                               | 14             |
| 2.3.2. Teori Merilee S. Grindle.....                                 | 16             |
| 2.3.3. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier .....          | 17             |
| 2.3.4. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn .....          | 17             |
| 2.4.Tinjauan Kepala Daerah .....                                     | 17             |
| 2.5.Tinjauan Tentang Wilayah Kecamatan .....                         | 20             |
| 2.6.Kerangka Pikir.....  | 20             |
| <b>III. METODOLOGI PENELITIAN</b>                                    |                |
| 3.1.Tipe Penelitian.....   | 23             |
| 3.2.Fokus Penelitian .....   | 23             |
| 3.3.Lokasi Penelitian .....  | 24             |
| 3.4.Jenis Dan Sumber data .....                                      | 25             |
| 3.4.1.Data Primer.....   | 25             |
| 3.4.2.Data Sekunder .....  | 25             |
| 3.5.Informan .....   | 26             |
| 3.6.Teknik Pengumpulan Data .....                                    | 26             |
| 3.6.1.Wawancara .....  | 26             |
| 3.6.2.Dokumentasi.....   | 27             |
| 3.6.3.Observasi .....  | 27             |
| 3.7. Teknik Pengolahan Data.....                                     | 28             |
| 3.7.1. <i>Editing</i> Data.....                                      | 28             |

|  |    |
|--|----|
| 3.7.2. Interpretasi .....              | 28 |
| 3.8. Teknik Analisis Data .....        | 28 |
| 3.8.1. Reduksi Data .....              | 29 |
| 3.8.2. Penyajian Data .....            | 29 |
| 3.8.3. Verifikasi dan Kesimpulan ..... | 29 |
| 3.9. Teknik Validasi Data .....        | 30 |

#### **IV. GAMBARAN UMUM**

|  |    |
|--|----|
| 4.1. Gambaran Umum Kabupaten Pesisir Barat .....   | 31 |
| 4.1.1. Utara .....                                 | 32 |
| 4.1.2. Timur .....                                 | 32 |
| 4.1.3. Selatan .....                               | 32 |
| 4.1.4. Barat .....                                 | 32 |
| 4.2. Gambaran Umum Kecamatan Pulau Pisang .....    | 32 |
| 4.3. Gambaran Umum Kecamatan Pesisir Selatan ..... | 33 |

#### **V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|   |    |
|---|----|
| 5.1. Hasil Penelitian .....   | 36 |
| 5.1.1. Isi Kebijakan .....  | 36 |
| 5.1.1.1. Kepentingan-Kepentingan Yang Berkaitan .....   | 37 |
| 5.1.1.2. Jenis Manfaat Yang Diperoleh .....   | 39 |
| 5.1.1.3. Derajat Perubahan Yang Ingin Dicapai .....   | 41 |
| 5.1.1.4. Letak Pengambilan Keputusan .....  | 42 |
| 5.1.1.5. Pelaksana Program .....  | 43 |
| 5.1.1.6. Sumber-Sumber Daya Yang Digunakan .....  | 44 |
| 5.1.2. Konteks Kebijakan ( <i>Context Of Policy</i> ) .....   | 48 |
| 5.1.2.1. Kekuasaan, Kepentingan-Kepentingan Dan Program<br>Atau Strategi Dari Aktor Yang Terlibat ..... | 49 |
| 5.1.2.2. Karakteristik Dari Lembaga Dan Rezim Yang<br>Berkuasa .....                                    | 50 |
| 5.1.2.3. Tingkat Kepatuhan Dan Adanya Respon Para<br>Pelaksana .....                                    | 51 |
| 5.2. Faktor Penyebab Kesenjangan .....  | 52 |
| 5.3. Pembahasan .....   | 53 |
| 5.3.1. Isi Kebijakan .....  | 53 |
| 5.3.1.1. Kepentingan-Kepentingan Yang Berkaitan .....   | 54 |
| 5.3.1.2. Jenis Manfaat Yang Diperoleh .....   | 56 |
| 5.3.1.3. Derajat Perubahan Yang Ingin Dicapai .....   | 57 |
| 5.3.1.4. Letak Pengambilan Keputusan .....  | 59 |
| 5.3.1.5. Pelaksana Program .....  | 60 |
| 5.3.1.6. Sumber-Sumber Daya Yang Digunakan .....  | 61 |
| 5.3.2. Konteks Kebijakan .....  | 62 |
| 5.3.2.1. Kekuasaan, Kepentingan-Kepentingan Dan<br>Program Atau Strategi Dari Aktor Yang Terlibat ..    | 62 |

|  |    |
|--|----|
| 5.3.2.2.Karakteristik Dari Lembaga Dan Rezim Yang Berkuasa.....  | 63 |
| 5.3.2.3.Tingkat Kepatuhan Dan Adanya Respon Para Pelaksana ..... | 64 |
| 5.4. Faktor Penyebab Kesenjangan .....                           | 66 |
| 5.4.1. Hambatan Pembangunan di Kecamatan Pulau Pisang.....       | 67 |

## **VI. PENUTUP**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 6.1. Simpulan.....               | 69 |
| 6.1.1. Isi Kebijakan .....       | 69 |
| 6.1.2. Konteks Implementasi..... | 69 |
| 6.2. Saran.....                  | 69 |

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

|   | <b>Halaman</b> |
|---|----------------|
| 1. Tabel 1.1. Ranperda APBD T.A 2017-2019 Kab Pesisir Barat .....         | 03             |
| 2. Tabel 1.2. Nama Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Kab PesiBar ..... | 04             |
| 3. Tabel 3.1. Data Informan .....   | 26             |
| 4. Tabel 4.1. Daftar Nama Pekon Kec Pulau Pisang.....                     | 33             |
| 5. Tabel 4.2. Instansi Layanan Dasar Kecamatan Pulau Pisang .....         | 33             |
| 6. Tabel 4.3. Daftar Nama Pekon Kec Pesisir Selatan .....                 | 34             |
| 7. Tabel 4.4. Instansi Layanan Dasar Kec Pesisir Selatan .....            | 34             |
| 8. Tabel 5.1. Komposisi Pegawai BAPPEDA .....                             | 45             |
| 9. Tabel 5.2. Komposisi Pegawai Kec Pesisir Selatan.....                  | 46             |
| 10. Tabel 5.3. Komposisi Pegawai Kec Pulau Pisang .....                   | 47             |

## DAFTAR GAMBAR

|  | <b>Halaman</b> |
|--|----------------|
| 1. Gambar 1.1. Pelayanan Dasar .....                   | 02             |
| 2. Gambar 1.2. Hasil Suara PILKADA.....                | 04             |
| 3. Gambar 1.3. Jumlah Penduduk Kab Pesisir Barat ..... | 05             |
| 4. Gambar 2.1. Kerangka Pikir.....                     | 22             |
| 5. Gambar 5.1 Peta Rute Krui-Pulau Pisang.....         | 67             |

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha yang terencana dan terarah, sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk memenuhi suatu kebutuhan serta dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Tujuan pembangunan di Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang dimana tujuan pembangunan tersebut sebagai berikut : 1. Melindungi segenap bangsa atau jumlah seluruh tumpah darah Indonesia; 2. Memajukan kesejahteraan umum; 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; 4. Ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan juga keadilan sosial.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan merupakan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi, dan permasalahan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah mencakup semua kegiatan pembangunan daerah dan sektoral yang berlangsung di daerah yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya salah satunya dengan memenuhi fasilitas layanan dasar sebagai warga negara yang memiliki hak yang sama.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut asas otonomi dan tugas bantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan pemerintah daerah adalah kepala daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Urusan pemerintah wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Urusan Pemerintahan, maka urusan pemerintah daerah terbagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berikut ini adalah gambar pembagian urusan wajib Pemerintah Daerah :



**Gambar 1.1. : Pelayanan Dasar**

*Sumber : Undang-Undang No 23 Tahun 2014*

Berdasarkan gambar 1.1. dapat dijelaskan bahwa pengelola pelayanan dasar menempatkan titik layanan lini depan di daerah seperti pendidikan berupa sekolah, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan infrastruktur.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pembangunan dasar di daerah sangat penting sebagai salah satu solusi dalam mewujudkan pelayanan yang baik bagi masyarakat, khususnya yang berada di daerah terpencil. Seperti Kabupaten Pesisir Barat merupakan Kabupaten termuda di Provinsi Lampung dan berada di pesisir Provinsi Lampung.

Kabupaten Pesisir Barat merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat yang disahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung pada tanggal 25 Oktober 2012, yang kemudian diresmikan pada tanggal 22 April 2013. Kabupaten yang berdiri belum genap satu dekade ini merupakan tugas dasar bagi pemerintah daerah untuk membangun dan menciptakan ekosistem pemerintahan guna mewujudkan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai modal untuk mewujudkan pembangunan untuk membantu serta mensejahterakan masyarakat. Berikut tabel Rancangan Peraturan Daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017-2020 Kabupaten Pesisir Barat :

**Tabel 1.1. : RANPERDA APBD Kabupaten Pesisir Barat T.A 2017-2020**

| No. | Tahun | Anggaran                | Presentase (%) |
|-----|-------|-------------------------|----------------|
| 1   | 2017  | Rp. 811.7328.308.994,74 | 89,65%         |
| 2   | 2018  | Rp. 878.820.238.460,00  | 90,70%         |
| 3   | 2019  | Rp. 920.057.166.125,51  | 88,94%         |
| 4   | 2020  | Rp. 885.078.876.678,00  | -              |

*Sumber: pesisirbaratkab.go.id*

Berdasarkan tabel 1.1 APBD Kabupaten Pesisir Barat sangat memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan layanan dasar disetiap kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat. Hal ini yang menyebabkan, tanda tanya besar dengan anggaran yang dimiliki, seharusnya APBD memprioritaskan pemenuhan layanan dasar dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat.

Sebagai Kabupaten baru, Kabupaten Pesisir Barat baru pertama kali mengadakan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di tahun 2015 yang

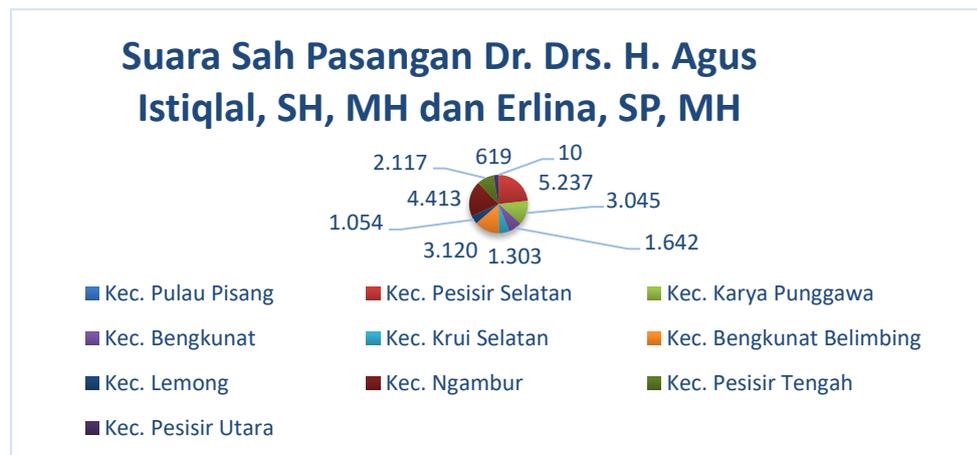
terdapat 4 calon Bupati dan Wakil Bupati. Berikut daftar nama calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015 :

**Tabel 1.2. : Nama Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat**

| Nomor Urut | Nama Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat |
|------------|---|
| 1          | Dr. Drs. H. Agus Istiqlal, SH, MH & Erlina, SP, MH                |
| 2          | Aria Lukito Budiwa, ST dan Ir. H. Efan Tolani                     |
| 3          | Ir. H. Jamal Naser dan H. Syahrial, ST                            |
| 4          | Krt. Oking Ganda Miharja, SH dan Irawan Topani, SH, M.Kn          |

Sumber : KPU Kabupaten Pesisir barat Tahun 2015

Pada pemilihan kepala daerah yang baru pertama kali di laksanakan di Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2015 yang di menangkan oleh pasangan calon no urut 1 Dr.Drs. H. Agus Istiqlal, SH,MH dan Erlina, SP,MH memperoleh suara tertinggi. Berikut ini gambar hasil perolehan suara sah pasangan calon Dr.Drs. H. Agus Istiqlal, SH,MH dan Erlina, SP,MH :



**Gambar 1.2. : Hasil Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Dr. Drs. H. Agus Istiqlal, SH, MH dan Erlina, SP, MH Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015**

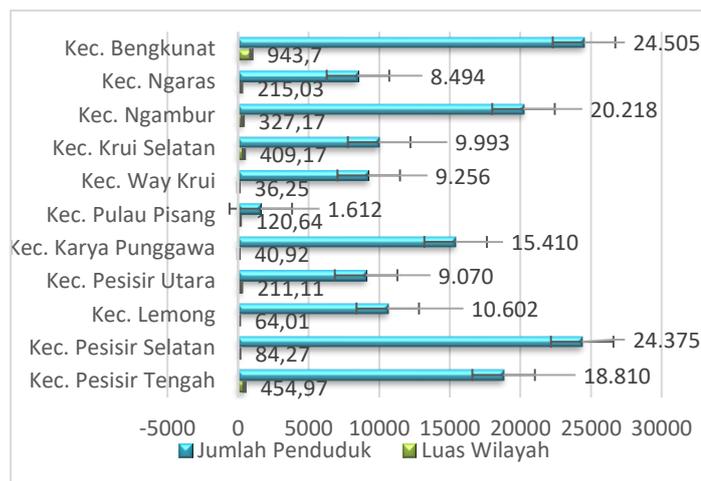
Sumber : <https://jdih.kpu.go.id/lampung/pesisirbarat/>, 2015

Berdasarkan gambar 1.2 perolehan suara pasangan calon Dr. Drs. H. Agus Istiqlal, SH, MH dan Erlina, SP, MH, di Kecamatan Pesisir Selatan dengan mendapatkan perolehan 5.237 suara sah. Sedangkan di Kecamatan Pulau Pisang memperoleh 10 suara sah. Perolehan suara yang jauh berbeda antara Kecamatan Pulau Pisang dan Kecamatan Pesisir Selatan yang menimbulkan

persepsi di masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan di antara Kecamatan Pulau Pisang dan Pesisir Selatan. Masyarakat melihat kondisi pembangunan di Kecamatan Pulau Pisang memprihatinkan. Masyarakat berfikir hal ini disebabkan oleh kecilnya perolehan suara yang di dapat pasangan calon nomor urut satu di Kecamatan Pulau Pisang.

Sebagai kepala daerah wajib berlaku adil dan bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Khususnya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang tidak hanya memprioritaskan salah satu daerah saja. Hal ini terjadi bukan hanya berdasarkan kepentingan pribadi maupun kelompok. Pemerataan pembangunan harus terwujud baik dari pusat hingga daerah dan tidak ada kesenjangan antara pusat dan daerah. Peneliti tertarik untuk mengetahui pembangunan layanan dasar di Kecamatan Pulau Pisang dan Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat dengan mempertimbangkan luas wilayah dan letak geografis yang menjadi alasan tidak terwujudnya pembangunan di suatu daerah.

Penduduk merupakan faktor penting dalam mewujudkan pembangunan di suatu daerah berdasarkan kebutuhan masyarakat serta kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan di daerah tersebut. Berikut jumlah penduduk serta luas wilayah Kabupaten Pesisir Barat:



**Gambar 1.3. : Jumlah Penduduk & Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Pesisir Barat**

Sumber: <https://pesisirbaratkab.bps.go.id>, Tahun 2020

Berdasarkan gambar 1.3. dijelaskan bahwa Kecamatan Pulau Pisang terdapat 6 Pekon dengan jumlah penduduk 1.612 jiwa serta memiliki luas wilayah 120,64 Km<sup>2</sup>. Sedangkan Kecamatan Pesisir Selatan terdapat 15 Pekon dengan jumlah penduduk 24.375 jiwa serta memiliki luas wilayah 84,27 Km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk dan luas wilayah yang sangat berbeda jauh antara Kecamatan Pulau Pisang dan Kecamatan Pesisir Selatan yang menimbulkan tanda tanya dimana kecamatan yang lebih besar dan lebih banyak penduduknya dapat terpenuhi pembangunan layanan dasar. Sedangkan Kecamatan yang luas wilayahnya lebih kecil dan jumlah penduduknya yang lebih sedikit masih jauh dari terwujudnya layanan dasar yang sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Urusan Pemerintahan.

Perbandingan pembangunan layanan dasar Kecamatan Pulau Pisang dan Kecamatan Pesisir Selatan dimana kantor Kecamatan Pulau Pisang sendiri kondisinya sangat memprihatinkan. Sejak tahun 2015 pembangunan kantor Kecamatan Pulau Pisang belum terealisasi sehingga harus menyewa rumah warga untuk dijadikan kantor kecamatan hingga saat ini. Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Puskesmas Pulau Pisang adalah salah satu bangunan yang dibuat sejak Kabupaten Pesisir Barat masih bergabung dengan Kabupaten Lampung Barat hingga saat ini. Sedangkan kantor Kecamatan yang berada di Pesisir Selatan kondisinya sangat baik dan Upt Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan merupakan bangunan baru dengan fasilitas yang sangat memadai.

Bangunan layanan dasar berbasis pendidikan di Kecamatan Pulau Pisang memiliki 2 Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan memiliki 1 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang kondisinya cukup baik. Sedangkan Kecamatan Pesisir Selatan dimana memiliki 17 Sekolah Dasar Negeri (SDN), 3 Sekolah Dasar Swasta (SDS), 4 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), 5 Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS), dan 1 Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) keseluruhan bangunan tersebut memiliki kondisi yang baik.

Pemerataan pembangunan layanan dasar di Kabupaten Pesisir Barat masih kurang khususnya pada infrastuktur. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi layanan dasar yang ada di Kecamatan Pulau Pisang bahwa pembangunan layanan dasar kurang diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dibandingkan dengan Kecamatan Pesisir Selatan yang kondisi layanannya sudah baik. Keadaan bangunan layanan dasar baik sarana dan prasarana kesehatan serta kantor pelayanan Kecamatan yang ada di Kecamatan Pulau Pisang perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Pemerintah memegang peranan sangat penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan dan menjadi bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat.

Adapun penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang Pembangunan Infrastruktur adalah penelitian oleh Wahyu Suprianto tahun 2018 dengan judul “Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor” hasil penelitiannya menganalisis kebijakan Pemerintah Daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan yang tidak terlepas adanya kepentingan politik dari aktor-aktor terkait yang berada di Lembaga Eksekutif. Penelitian kedua oleh Endah Puji Lestari, Riyanto, Romula tahun 2008 dengan judul ”Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan” hasil penelitian menganalisis Kebijakan pembangunan infrastruktur perdesaan pada pavingisasi jalan desa untuk mengatasi tanah labil di Kecamatan Dander sehingga jalan yang sudah dibangun dapat bertahan lama. Layanan dasar berperan penting untuk memberikan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat secara cepat, efektif dan efisien. Ketimpangan antar daerah yang lebih maju menimbulkan ketidak merataan pembangunan di suatu daerah. Setiap masyarakat yang menduduki suatu wilayah membutuhkan infrastruktur pelayanan yang memadai guna mempercepat proses administrasi masyarakat. Ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu syarat utama untuk pembangunan yang berkualitas. Adanya infrastruktur ini kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

Penelitian ketiga oleh Retno Wulan Sekarsari tahun 2018 dengan judul “Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan antar Kecamatan di Kabupaten Kediri” hasil penelitian menganalisis implementasi pembangunan jalan antar Kecamatan di Kabupaten Kediri yang meliputi peningkatan dan pemeliharaan jalan.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah peneliti akan meneliti permasalahan kesenjangan pembangunan layanan dasar antara Kecamatan Pulau Pisang dan Kecamatan Pesisir Selatan. Penelitian ini memiliki fokus terhadap pemerataan pembangunan di daerah yang berdasarkan dengan aturan dan juga melihat penyebab kesenjangan yang terjadi di Kabupaten Pesisir Barat antara Kecamatan Pulau Pisang dan Kecamatan Pesisir Selatan.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik ingin menganalisis tentang faktor penyebab kesenjangan pembangunan layanan dasar di Kabupaten Pesisir Barat (Studi Kasus Kecamatan Pulau Pisang dan Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat) dengan menggunakan teori Implementasi kebijakan dari Model Mirelee S. Grindle meliputi keberhasilan Implementasi Kebijakan juga ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri yang terdiri dari *Content of Policy and Context of Policy*, Grindle (Agustino, 2006).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Mengapa Terjadi Kesenjangan Pembangunan Layanan Dasar Di Kecamatan Pulau Pisang Dan Kecamatan Pesisir Selatan ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditentukan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya kesenjangan pembangunan layanan dasar di Kecamatan Pesisir Selatan dan Kecamatan Pulau Pisang.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu pemerintahan khususnya tentang implementasi kebijakan serta memberikan gambaran dan penjelasan tentang ketimpangan pembangunan layanan dasar di Kecamatan Pulau Pisang dan Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan membantu memberikan alternatif berupa informasi dan bahan referensi bagi pemeritah daerah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan layanan dasar di Kabupaten Pesisit Barat.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Pembangunan dan Pemerataan Pembangunan

#### 2.1.1 Pembangunan

Istilah Pembangunan secara tradisional diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional yang kondisi-kondisi ekonomi awalnya kurang lebih bersifat statis dalam kurun waktu yang cukup lama (Todaro, 2008). Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang sering kali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan dan meningkatkan produktivitas.

Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan pembangunan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara dan bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Dari defenisi diatas maka muncul 6 ide pokok sebagai berikut :

1. Pembangunan merupakan suatu proses, pembangunan dilakukan secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang bersifat tanpa akhir.
2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan.
3. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik jangka waktu pendek, jangka sedang, dan jangka panjang, yang dimana dilakukan untuk jangka waktu tertentu.
4. Rencana Pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan Pembangunan.
5. Pembangunan mengarah modernitas yang diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari sebelumnya.

6. Modernitas yang ingin dicapai bersifat multi dimensional.

Teori Pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua paradigma besar yaitu modernisasi dan ketergantungan (Tikson, 2005). Paradigma modernisasi mencakup teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan. Paradigma ketergantungan mencakup teori-teori keterbelakangan (*under-development*) ketergantungan (*dependent development*) dan sistem dunia (*world system theory*) sesuai dengan klasifikasi (Larrain, 1994), Sedangkan (Tikson, 2005) membaginya kedalam tiga klasifikasi teori Pembangunan yaitu modernisasi, keterbelakangan dan ketergantungan.

Berdasarkan buku dan pendapat ahli pembangunan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada pada suatu daerah sehingga sangat dibutuhkan Pemerataan Pembangunan baik dari daerah terpencil hingga daerah perkotaan, dari daerah subur hingga daerah yang tandus selama masih terdapat masyarakat di daerah tersebut.

### **2.1.2 Pemerataan Pembangunan**

Konsep Pemerataan Pembangunan daerah menurut (Kartasasmita, 2003) merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengembangkan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat serta melakukan pemerataan fasilitas umum dan sosial juga pengembangan pembangunan pedesaan dalam upaya peningkatan derajat kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Dalam hal ini pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya koordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004).

Pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005). Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem social seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi,

kelembagaan dan juga budaya (Alexander, 1994). Pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat (Portes, 1976).

## **2.2. Penyebab Kesenjangan Pembangunan**

Menurut (Sjafrizal, 2012), beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah yaitu:

### **1. Perbedaan Kandungan Sumber Daya Alam**

Perbedaan kandungan sumber daya alam akan memengaruhi kegiatan produksi pada daerah tersebut. Daerah dengan kandungan sumber daya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih rendah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan menjadi lebih cepat. Sedangkan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih kecil hanya dapat memproduksi barang-barang dengan biaya produksi lebih tinggi sehingga daya saingnya yang menjadi lemah. Kondisi tersebut menyebabkan daerah yang bersangkutan cenderung mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat.

### **2. Perbedaan Kondisi Demografis**

Perbedaan kondisi demografis meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Kondisi demografis akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat setempat. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

### 3. Kurang Lancarnya Mobilitas Barang Dan Jasa

Mobilitas barang dan jasa meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan. Alasannya adalah apabila mobilitas kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat di jual ke daerah lain yang membutuhkan. Akibatnya adalah ketimpangan Pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya.

### 4. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah

Pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat pada suatu daerah dimana konsentrasi kegiatan ekonominya cukup besar. Kondisi inilah yang selanjutnya akan mendorong proses Pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat.

### 5. Alokasi dana pembangunan antar wilayah

Alokasi dana ini bisa berasal dari pemerintah maupun swasta. Pada sistem pemerintahan otonomi maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung lebih rendah. Untuk investasi swasta lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar. Dimana keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan kekuatan yang berperan banyak dalam menarik investasi swasta. Keuntungan lokasi ditentukan oleh biaya transport baik bahan baku dan hasil produksi yang harus dikeluarkan pengusaha, perbedaan upah buruh, konsentrasi pasar, tingkat persaingan usaha dan sewa tanah. Oleh karena itu investasi akan cenderung lebih banyak di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah perdesaan.

## **2.3. Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui

formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan.

Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2008) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri. Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan sebagai berikut :

### **2.3.1. Teori George C. Edward**

Edward III (Subarsono, 2011) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*group target*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

- b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut pandangan Edwards (Winarno, 2008) sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Struktur Birokrasi menurut Edwards (Winarno, 2008) terdapat dua karakteristik utama, yakni Standard Operating Procedures (SOP) dan Fragmentasi: SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi yang kompleks dan

tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.

### 2.3.2. Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (Subarsono, 2011) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan Wibawa (Samodra Wibawa, 1994) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal yang kepentingannya terpengaruhi oleh kebijakan sebagai berikut :

- a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- b. Derajat perubahan yang diinginkan.
- c. Kedudukan pembuat kebijakan.
- d. (Siapa) pelaksana program.
- e. Sumber daya yang dihasilkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c. Kepatuhan dan daya tanggap.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

### **2.3.3. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier**

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Subarsono, 2011) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

### **2.3.4. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn**

Menurut (Subarsono, 2011) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Berdasarkan ketiga model implementasi di atas, Penelitian ini menggunakan teori dari Merilee S. Grindle yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Penggunaan teori tersebut dapat membantu peneliti untuk menganalisis Pembangunan Layanan Dasar di Kecamatan Pulau Pisang dan Kecamatan Pesisir Selatan secara mendalam.

## **2.4. Kepala Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa sebuah pemerintah daerah memiliki seorang kepala daerah yang dibantu oleh seorang wakil kepala daerah. Kepala daerah untuk Provinsi disebut Gubernur, kepala daerah untuk Kabupaten disebut dengan Bupati, dan kepala daerah untuk Kota disebut Walikota. Masa Jabatan

kepala daerah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Berikut dijelaskan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tugas Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
5. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
6. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam melaksanakan tugas kepala daerah memiliki beberapa kewenang. Namun kewenangan serta tugas dilarang dilaksanakan jika kepala daerah sedang menjalani masa tahanan. Selama menjalani masa tahanan, tugas dan wewenang dilaksanakan oleh wakil kepala daerah. Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah. Berikut kewenangan kepala daerah :

1. Mengajukan rancangan Perda;
2. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
3. Menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dan keputusan kepala daerah;
4. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;
5. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
6. Melaksanakan program strategis nasional; dan
7. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah.

Selain kewajiban diatas kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dibahas pada tulisan selanjutnya. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai hak protokoler dan hak keuangan. Hak keuangan meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang dikenai sanksi pemberhentian sementara tidak mendapatkan hak protokoler serta hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri/suami.

## **2.5. Wilayah Kecamatan**

Kecamatan adalah sebuah pembagian wilayah administratif negara Indonesia di bawah Kabupaten atau Kota. Sebuah Kecamatan dipimpin oleh seorang camat dan dipecah kepada beberapa kelurahan dan desa-desa. Di Indonesia, sebuah Kecamatan atau Kabupaten adalah pembagian dari Kabupaten atau Kota (Kota Madya). Sebuah Kabupaten itu sendiri dibagi menjadi kelurahan atau desa administratif. Dalam Hal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dibawah pimpinan Camat. Kecamatan menempati posisi yang strategis. Di Indonesia, pengelola Pelayanan Dasar menempatkan titik layanan lini depan mereka di wilayah Kecamatan seperti Sekolah Menengah Pertama, Puskesmas dan tenaga operator untuk membantu proses pelayanan administrasi kependudukan. Dengan demikian, Kecamatan berada di titik pertemuan antara warga yang tinggal di desa dengan pemberi pelayanan di tingkat kecamatan. Oleh sebab itu, kecamatan dapat berperan penting dalam memastikan warga mampu mengakses layanan dasar, sekaligus mendorong pemberi pelayanan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan terjangkau untuk semua masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin dan rentan.

Kecamatan juga memiliki tanggung jawab penting terhadap, mengkoordinasikan pelayanan dasar bersama dengan layanan dan pemerintah desa, menyediakan dukungan teknis dalam penyusunan dan penganggaran desa, memantau penggunaan dana desa, khususnya untuk mendorong akses layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, serta mengkoordinasikan penyelesaian masalah layanan dasar dengan pemangku kepentingan. Berdasarkan posisi, tugas dan tanggung jawab kecamatan, memiliki peran yang strategis dalam menyelesaikan masalah yang ada di wilayahnya serta memiliki tugas untuk memastikan pelayanan terwujud hingga ke masyarakat.

## **2.6. Kerangka Pikir**

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Terutama dalam melaksanakan fungsi pemerintahan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah menerangkan bahwa kebijakan pembangunan Layanan Dasar merupakan salah satu fungsi dari pemerintah dan diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam hal pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat. Untuk itu pemerataan pembangunan perlu diwujudkan guna menghindari perpecahan dan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

Pada penelitian ini peneliti menganalisis permasalahan Pembangunan Layanan Dasar di Kecamatan Pulau Pisang dan Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat dengan menggunakan teori model implementasi dari Merilee S. Grindle. Model tersebut menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh derajat *implemenbility* dari kebijakan tersebut. Derajat tersebut ditentukan dua variabel, yaitu:

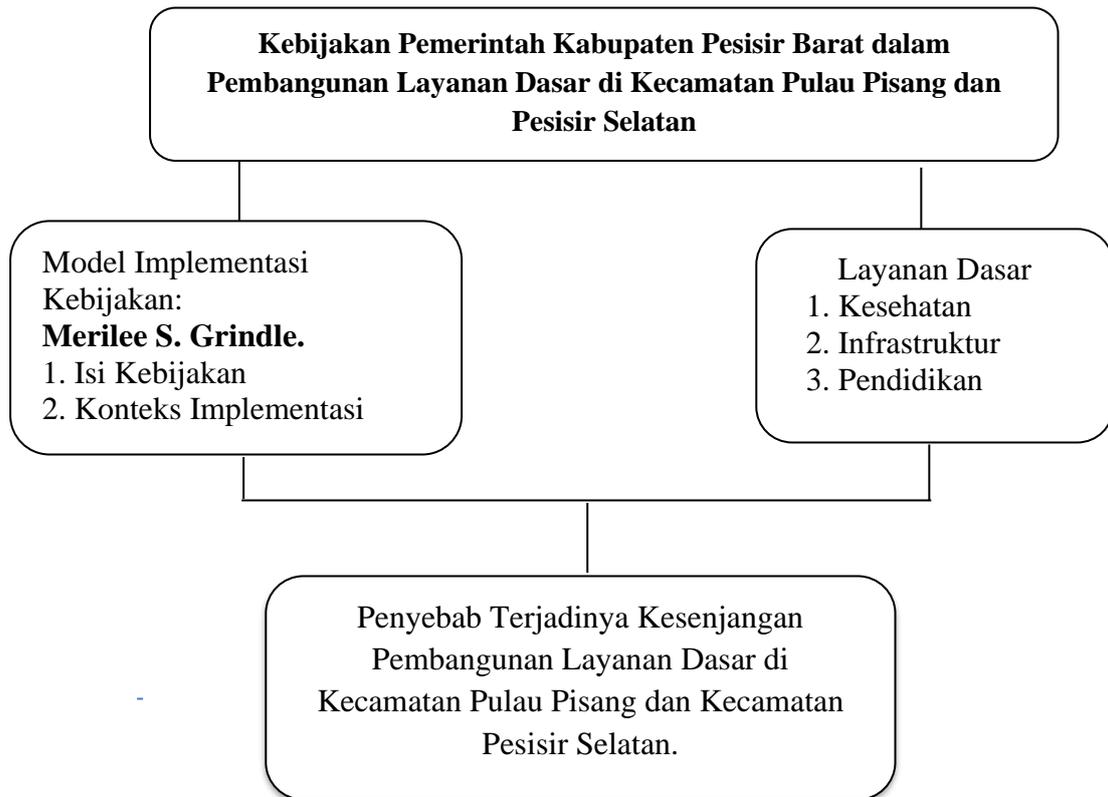
1. Isi Kebijakan meliputi:

- a) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
- b) Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- c) Derajat perubahan yang diinginkan.
- d) Kedudukan pembuat kebijakan.
- e) (Siapa) pelaksana program.
- f) Sumber daya yang dihasilkan.

2. Konteks Implementasi, meliputi:

- a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b) Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c) Kepatuhan dan daya tanggap

Berikut gambar kerangka pikir :



**Gambar 2.1 Kerangka Pikir**

*Sumber : Diolah Peneliti 2021*

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengelola dan menggambarkan data serta informasi berdasarkan fakta-fakta yang tampak untuk kemudian dianalisis lebih lanjut. Berkenaan dengan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (Moleong, 2012).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini sangat tepat karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pemerataan pembangunan berbasis wilayah kecamatan dan faktor penyebab ketimpangan pembangunan layanan dasar di Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini memiliki fokus terhadap pemerataan pembangunan di daerah yang berdasarkan dengan aturan, dan ingin melihat kesejangan yang terjadi antara Kecamatan Pulau Pisang dan Kecamatan Pesisir Selatan di Kabupaten Pesisir Barat, apakah berdasarkan kepentingan pihak tertentu atau memang sudah berdasarkan aturan yang berlaku, sehingga terwujudnya pemerataan pembangunan, tanpa melihat letak geografis maupun kepentingan para elit penguasa.

#### **3.2. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan sebuah batasan-batasan masalah dalam penelitian kualitatif. Hal ini menjadi sangat penting mengingat fokus penelitian dapat membatasi ruang lingkup penelitian dan dapat dijadikan pedoman dalam mengarahkan sebuah kegiatan penelitian. Fokus penelitian akan membantu peneliti dalam membuat keputusan yang tepat mengenai data yang akan dikumpulkan dan data yang tidak perlu dikumpulkan (Sugiyono, 2011).

Berdasarkan uraian di atas, fokus dalam penelitian ini adalah tentang pelaksanaan kebijakan Pemerataan Pembangunan Berbasis Wilayah Kecamatan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle yang meliputi:

1. Isi Kebijakan, meliputi:

- a) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
- b) Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- c) Derajat perubahan yang diinginkan.
- d) Kedudukan pembuat kebijakan.
- e) Siapa pelaksana program.
- f) Sumber daya yang dihasilkan.

2. Konteks Implementasi, meliputi:

- a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b) Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c) Kepatuhan dan daya tanggap

### **3.3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang akan diteliti dalam rangka mendapatkan data-data yang akurat. Penentuan lokasi penelitian cara yang baik ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian, sebagai pertimbangan dalam menentukan lokasi penelitian (Moleong, 2012).

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Pulau Pisang dan Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Penentuan lokasi penelitian tersebut, karena terjadi kesenjangan pembangunan layanan dasar di Kecamatan Pulau Pisang dan Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat tersebut. Kabupaten Pesisir Barat memiliki 11 kecamatan dan memiliki satu kecamatan yang berada didaratan yang terpisah dan terkecil yaitu, Kecamatan Pulau Pisang dan sebaliknya kecamatan terbesar yang ada di Kabupaten Pesisir Barat yaitu, Kecamatan Pesisir Selatan, serta di Kecamatan Pulau Pisang bupati terpilih

mendapatkan suara terkecil dari seluruh kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat pada pemilihan kepala daerah pada tahun 2015, sedangkan di Kecamatan Pesisir Selatan bupati terpilih mendapat suara terbanyak dari semua kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat.

### **3.4. Jenis dan Sumber Data**

Peneliti harus mendapatkan data secara langsung dan akurat sesuai dengan data yang diteliti di lapangan. Peneliti harus mencari data dari sumber utama, dan bukan dari sumber kedua agar keabsahan data terjamin. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### **3.4.1.Data Primer**

Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan informan dan pihak-pihak terlibat yang ditentukan dari keterkaitan informan tersebut dengan masalah penelitian. Wawancara yang dibuat peneliti sebelum melakukan penelitian secara langsung dilapangan dengan bantuan pedoman wawancara.

#### **3.4.2.Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data-data tertulis yang digunakan sebagai informasi pendukung. Data yang diperoleh dengan berdasarkan pada dokumen-dokumen, catatan-catatan, profil, arsip-arsip resmi, serta literatur lainnya yang relevan dalam melengkapi data primer penelitian.

Berikut ini data sekunder yang digunakan di penelitian ini :

1. APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2020
2. Hasil Suara Sah Pasangan Dr. Drs. H. Agus Istiqlal, SH, MH dan Erlina, SP, MH.
3. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kabupaten Pesisir Barat.

### 3.5. Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*, informan penelitian ditentukan berdasarkan pertimbangan peneliti yang mewakili sumber informasi yang ingin didapatkan oleh peneliti. Adapun yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini antara lain:

**Tabel 3.1 Data Informan**

| No | Nama                   | Instansi                        | Jabatan                            |
|----|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1  | Drs. Zukri Amin, MP    | Bappeda Kabupaten Pesisir Barat | Kepala Badan                       |
| 2  | Aliyudin, M.S.Pd       | Kecamatan Pesisir Selatan       | Camat Pesisir Selatan              |
| 3  | Burhanuddin, SH        | Kecamatan Pulau Pisang          | Kasi TRANTIB                       |
| 4  | Brian Vrizada, SH, M.M | Bappeda Kabupaten Pesisir Barat | Kabid Pemerintahan & Sosial Budaya |
| 5  | Yogi Pratama           | Masyarakat Pulau Pisang         | -                                  |
| 6  | Herniyanti             | Masyarakat Pulau Pisang         | -                                  |
| 7  | Juniarsyah             | Masyarakat Pesisir Selatan      | -                                  |
| 8  | Okta Putri             | Masyarakat Pesisir Selatan      |                                    |

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2021)

Alasan peneliti menentukan informan diatas karena dari segala aspek dan dapat dilihat untuk dapat menjelaskan jawaban dari penelitian ini. Sehingga informan diatas mampu memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang penting dalam penelitian, namun dalam sebuah penelitian tidak cukup hanya sekedar mengumpulkan data, tetapi juga harus menganalisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebaga berikut:

#### 3.6.1.Wawancara

Metode *interview* (wawancara) adalah alat pengumpulan data yang digunakan dalam komunikasi langsung yang berbentuk sejumlah pertanyaan lisan yang diajukan oleh pengumpul data (*interviewer*) sebagai pencari informasi yang dijawab secara lisan oleh informan (*interviewee*) sebagai pemberi informasi. Peneliti menggunakan teknik

semi struktur untuk mendapatkan informasi dengan panduan wawancara, dan berdasarkan panduan wawancara dan jawaban informan mampu di kembangkan sehingga mampu menjawab pertanyaan dan menghasilkan sudut pandang berbeda untuk menjawab pertanyaan yang diberikan (Sofar Silaen dan Widiyono, 2013).

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti berupa tanya jawab antara peneliti, informan dan pihak-pihak yang terkait mengenai pelaksanaan kebijakan Pemerataan Pembangunan dengan menggunakan panduan wawancara yang sudah disiapkan sebelumnya.

### **3.6.2. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, video, atau karya-karya yang monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari metode wawancara dan studi kepustakaan dalam penelitian ini.

Dokumen di gunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis mengenai kebijakan pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam pemerataan pembangunan layanan dasar di Kecamatan Pulau Pisang dan Kecamatan Pesisir Selatan serta dokumen-dokumen maupun arsip-arsip yang berkaitan tentang pembangunan layanan dasar di Kabupaten Pesisir Barat. Berikut ini data yang digunakan di penelitian ini :

1. APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2020
2. Hasil Suara Sah Pasangan Dr. Drs. H. Agus Istiqlal, SH, MH dan Erlina, SP, MH.
3. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kabupaten Pesisir Barat

### **3.6.3. Observasi**

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, (Sugiyono, 2014). Observasi atau pengamatan langsung dilakukan dengan cara melihat permasalahan yang memprihatinkan serta tidak meratanya pembangunan infrastruktur layanan dasar di Kecamatan Pulau Pisang dan Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

### 3.7. Teknik Pengolahan Data

Setelah data diperoleh dari lapangan dan terkumpul semua maka tahap selanjutnya adalah mengolah data tersebut. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

#### 3.7.1. *Editing Data*

*Editing* data adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya, dalam proses ini, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada fokus pedoman wawancara dan memilah serta menentukan data-data yang diperlukan untuk penulisan. Mengolah kegiatan observasi yaitu peneliti mengumpulkan data-data yang menarik dari hasil pengamatan sehingga dapat ditampilkan dengan baik.

#### 3.7.2. Interpretasi

Interpretasi data digunakan untuk mencari makna dan hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang diperoleh, tetapi data diinterpretasikan untuk kemudian mendapatkan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Peneliti memberikan penjabaran dari berbagai data yang telah melewati proses *editing* sesuai dengan fokus penelitian. Pelaksanaan interpretasi dilakukan dengan memberikan penjelasan berupa kalimat bersifat narasi dan deskriptif. Data yang telah memiliki makna akan di analisis data berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi.

### 3.8. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara seorang peneliti dalam mengelola data yang telah terkumpul sehingga mendapatkan suatu kesimpulan berdasarkan penelitian. Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014), mengemukakan bahwa

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data dapat dilakukan dalam beberapa tahap:

### **3.8.1.Reduksi data**

Reduksi data dilakukan dengan memfokuskan hasil penelitian pada hal yang dianggap penting oleh peneliti. Reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul dari hasil catatan lapangan dengan cara merangkum dan mengklasifikasikan sesuai masalah dan aspek- aspek permasalahan yang diteliti.

### **3.8.2.Penyajian Data**

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Pada penelitian ini, secara teknis data-data yang telah di organisir ke dalam matriks analisis data akan disajikan kedalam bentuk teks naratif, gambar, tabel, dan bagan. Penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan hasil temuan dalam wawancara terhadap informan serta menghadirkan dokumen sebagai penunjang data.

### **3.8.3. Verifikasi dan Kesimpulan**

Verifikasi merupakan kegiatan yang sudah dilakukan peneliti sejak pengumpulan data, kendati masih bersifat sementara. Pengujian ulang dilakukan demi mendekati pemaknaan yang lebih terjamin kebenaran dan validitasnya. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis, dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif.

### **3.9. Teknik Validasi atau Keabsahan Data**

Teknik keabsahan data merupakan salah satu teknik yang penting dalam menentukan validitas dan realibilitas data yang diperoleh dalam penelitian ini, teknik keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

Teknik triangulasi dipilih dalam penelitian ini karena dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber data dari wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara pengecekan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, (Sugiyono, 2014),.

## **IV. GAMBARAN UMUM**

### **4.1. Kabupaten Pesisir Barat**

Kabupaten Pesisir Barat dengan ibu Kota Krui adalah salah satu dari lima belas Kabupaten/Kota diwilayah Provinsi Lampung. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 (Lembaran Negara Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5364) tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung tertanggal 16 November 2012 dan diundangkan pada tanggal 17 November 2012. Kabupaten Pesisir Barat secara administratif terletak diujung bagian barat Provinsi Lampung yang bagian barat wilayahnya merupakan garis pantai samudera hindia dengan letak wilayah bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Lampung Barat, wilayah bagian timur dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus.

Wilayah Kabupaten Pesisir Barat memiliki luas  $\pm 2.907,23$  Km<sup>2</sup> atau 8,39% dari luas wilayah Provinsi Lampung, memiliki garis pantai 221,5 Km (daratan dan garis pulau-pulau) dan garis pantai daratan 210 Km dengan jumlah penduduk sebesar  $\pm 156.276$  jiwa dengan mata pencaharian pokok sebagian besar penduduknya sebagai petani dan nelayan.

Wilayah Kabupaten Pesisir Barat secara administratif terdiri dari 11 kecamatan dengan 116 desa (di Pesisir Barat disebut Pekon) dan 2 Kelurahan, dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Bengkunt Belimbing dengan luas 943,70 Km<sup>2</sup> dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Krui Selatan dengan luas 36,25Km<sup>2</sup>. Batas wilayah administratif Kabupaten Pesisir Barat adalah sebagai berikut:

#### **4.1.1. Utara**

Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ujung Rembun, Desa Pancur Mas, Desa Sukabanjar Kecamatan Lumbok Seminung, Desa Kubu Prahu Kecamatan Balik Bukit, Desa Kuta besi, Desa Sukabumi Kecamatan Batu Brak, Desa Sukamarga, Desa Ringinsari, Desa Sumber Agung, Desa Tuguratu, Desa Banding Agung Kecamatan Suoh, Desa Hantatai, Desa Tembelang, Desa Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat, Desa Gunung Doh Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Desa Ngarit, Desa Rejosari, Desa Petekayu, Desa Sirnagalih Kecamatan Ulu Belu, Desa Datar Lebuay Kecamatan Naningan Kabupaten Tanggamus, Desa Way Beluah, dan Desa Melaya Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan;

#### **4.1.2. Timur**

Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tampang Tua Kecamatan Pematang Sawa, Desa Sedayu, Desa Sidomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus;

#### **4.1.3.Selatan**

Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia;

#### **4.1.4. Barat**

Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

### **4.2. Kecamatan Pulau Pisang**

Kecamatan Pulau Pisang lahir pada tanggal 20 Desember 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2012 melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor : G/508/B.II/HK/2012 tentang persetujuan Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat. Kecamatan ini sebelumnya merupakan bagian dari Wilayah Pesisir Utara yang terdiri dari 6 (Enam) pekon yaitu :

**Tabel 4.1 Daftar Nama Pekon Kecamatan Pulau Pisang**

| NO | NAMA PEKON               | KETERANGAN |
|----|--------------------------|------------|
| 1  | Pekon Pasar Pulau Pisang | Definitip  |
| 2  | Pekon Bandar Dalam       | Definitif  |
| 3  | Pekon Pekon Lok          | Definitif  |
| 4  | Pekon Sukadana           | Definitif  |
| 5  | Pekon Sukamarga          | Definitif  |
| 6  | Pekon Labuhan            | Definitif  |

Sumber: <https://pesisirbaratkab.bps.go.id>, Tahun 2020

Kecamatan Pulau Pisang memiliki luas wilayah 313 Hektare dengan jumlah Penduduk 1.971 Jiwa. Batas wilayah Kecamatan Pulau Pisang berbatasan dengan samudera hindia. Serta Kecamatan Pulau Pisang memiliki bangunan layanan dasar, sebagai berikut :

**Tabel 4.2 Instansi Layanan Dasar Kecamatan Pulau Pisang**

| No | Pendidikan     |        | Kesehatan      |        | Pelayanan Administrasi |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|------------------------|--------|
|    | Jenis Instansi | Jumlah | Jenis Instansi | Jumlah | Jenis Instansi         | Jumlah |
| 1. | SDN            | 2      | UptPuskesmas   | 1      | KantorKecamatan        | -      |
| 2. | SMPN           | 1      | -              | -      | -                      | -      |

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2019

Berdasarkan diatas Kecamatan Pulau Pisang memiliki bangunan unit pelayanan dasar yaitu 2 sekolah dasar negeri, 1 sekolah pertama negeri, dan upt puskesmas. Sedangkan untuk kantor Kecamatan Pulau Pisang belum memiliki kantor permanen sejak Kecamatan Pulau Pisang berdiri pada tahun 2012.

#### 4.3. Kecamatan Pesisir Selatan

Kecamatan Pesisir Selatan lahir pada tanggal 20 Desember 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2012 melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor G/508/B.II/HK/2012 tentang persetujuan Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat. Kecamatan Pesisir Selatan terdiri dari 15 (Lima Belas) pekon yaitu :

**Tabel 4.3 Daftar Nama Pekon Kecamatan Pesisir Selatan**

| NO | NAMA PEKON                  | KETERANGAN |
|----|-----------------------------|------------|
| 1  | Pekon Negeri Ratu Tenumbang | Definitif  |
| 2  | Pekon Sukarame              | Definitif  |
| 3  | Pekon Pelita Jaya           | Definitif  |
| 4  | Pekon Sumur Jaya            | Definitif  |
| 5  | Pekon Tanjung Jati          | Definitif  |
| 6  | Pekon Pagar Dalam           | Definitif  |
| 7  | Pekon Tanjung Setia         | Definitif  |
| 8  | Pekon Way Jambu             | Definitif  |
| 9  | Pekon Marang                | Definitif  |
| 10 | Pekon Tanjung Raya          | Definitif  |
| 11 | Pekon Bangun Negara         | Definitif  |
| 12 | Pekon Ulok Manik            | Definitif  |
| 13 | Pekon Biha                  | Definitif  |
| 14 | Pekon Tulung Bamban         | Definitif  |
| 15 | Pekon Paku Negara           | Definitif  |

*Sumber: Monografi Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Dalam Angka Tahun 2014.*

Kecamatan Pulau Pisang memiliki luas wilayah 409,17 Hektare dengan jumlah Penduduk 22,364 Jiwa , Letak administratif Kecamatan Pesisir Selatan terletak di antara 2 Kecamatan dan berada di tengah-tengah antara Samudra Hindia dengan TNBBS (Taman Nasional Bukit Barisan selatan) yaitu, di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Krui Selatan, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ngambur, di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia, dan di sebelah Timur berbatasan dengan TNBBS.

**Tabel 4.4 Instansi Layanan Dasar Kecamatan Pesisir Selatan**

| No | Pendidikan     |        | Kesehatan      |        | Pelayanan Administrasi |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|------------------------|--------|
|    | Jenis Instansi | Jumlah | Jenis Instansi | Jumlah | Jenis Instansi         | Jumlah |
| 1. | SDN            | 17     | UptPuskesmas   | 1      | KantorKecamatan        | 1      |
| 2. | SDS            | 3      | -              | -      | -                      | -      |
| 3. | SMPN           | 4      | -              | -      | -                      | -      |
| 4. | SMPS           | 5      | -              | -      | -                      | -      |
| 5. | SMAN           | 1      | -              | -      | -                      | -      |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2019*

Berdasarkan tabel 4.4 terdapat 30 bangunan pendidikan, dan memiliki 1 bangunan upt puskesmas dan memiliki 1 kantor kecamatan secara permanen. Kondisi bangunan pendidikan di Kecamatan Pesisir Selatan dalam kondisi yang cukup baik dan memadai, serta kantor kecamatan yang memadai dalam pelaksanaan kecamatan seperti ruang rapat, lapangan upacara, dan lahan yang strategis yang terletak di Pekon Biha. Bangunan kesehatan Kecamatan Pesisir Selatan menjadi bangunan terbaik, sebagai Upt Puskesmas Biha menjadi Puskesmas terbaik se Kabupaten Pesisir Barat.

## **VI. SIMPULAN DAN SARAN**

### **6.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pembangunan layanan dasar di Kecamatan Pulau Pisang dan Kecamatan Pesisir Selatan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 tidak proporsional (adil). Sebagaimana Teori Grindlee yaitu :

#### **6.1.1. Isi Kebijakan**

Pada RPJMD Kabupaten Pesisir Barat belum tercermin adanya pemerataan pembangunan, begitu juga dalam APBD Pesisir Barat 2020 tidak terlihat aspek keadilannya bagi masyarakat Pulau Pisang.

#### **6.1.2. Konteks Implementasi**

Skala prioritas dalam pelaksanaan pembangunan tidak terlihat, padahal Kecamatan Pulau Pisang termasuk daerah terluar yang harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah. Usul-usul yang disampaikan melalui musrenbang kecamatan Pulau Pisang tidak mendapat perhatian.

### **6.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat disarankan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah harus melakukan revisi RPJMD yang berorientasi kepada pemerataan dan keadilan dalam pembangunan.
2. Pemerintah daerah harus memberikan prioritas pembangunan kepada daerah terluar
3. Pemerintah Daerah harus memperhatikan usulan-usulan yang di sampaikan oleh masyarakat melalui Musrenbang

4. Menurut hemat peneliti, tulisan ini masih sangat banyak kekurangan mengenai penelitian dan pembahasannya dikarenakan ketebatasan penulis baik terkait konsep atau metode penelitian. Diharapkan nantinya ada yang melakukan penelitian yang sejenis dan tulisan ini dapat menjadi bahan acuan serta evaluasi bagi peneliti selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.
- Abe, Alexander. 1994. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pusat Jogja Mandiri.
- AG Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta :PustakaPelajar.
- AG. Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Public “konsep teori dan aplikasi”*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Agustino, Leo.2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Malang:CV. Alfabeta
- Alejandro, Portes. 1976. “*On the Sociology of National Development: Theories and Issues*”. American Journal of Sociology
- Arikunto, S. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Bumi Aksara
- Bratakusumah dan Solihin. 2011. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta : Gramedia Pustaka
- Budi Winarno. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressine
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta : Kencana Prenanda Media Group.
- Hariyoso, S. 2002. *Pembaruan Birokrasi dan Kebijakan Publik*. Peradaban. Yogyakarta.
- Kartasmita, Ginandjar. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep pembangunan yang berakar pada masyarakat*. Jakarta
- Lucian W. Pye, *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik*, Jakarta: Gramedia, 1985
- Merilee, Grindle S 1980. *Politics and Implementation in the Third World*. Princeton University Press. New Jersey,
- Moleong, Lexy, J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya.
- Nugroho, I. Dan Rochimin Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah : Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta : LP3ES
- Riyadi & Supriadi, Deddy. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka
- Samodra Wibawa, 1994, *Kebijakan Publik : Proses dan Analisis*, Cet. Ke-1, Jakarta: Intermedia
- Sjafrizal. 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sofar Silaen dan Widiono. 2013, *Metodelogi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, In Media.
- Sugiono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&N*. Bandung: Alfabeta

Tikson, T. Deddy. 2005. *Administrasi Pembangunan*. Makassar : Gemilang Persada

Todaro.2008.*Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita

### **Skripsi :**

Bulohlabna, C. 2008. *Tipologi dan Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Timur Indonesia*.Skripsi Fakultas Ekonomi dan Manajemen.Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Endah, Riyanto, Romula. 2008. *Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan*. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Malang

Sekarsari, Wulan. 2018. *Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan antar Kecamatan di Kabupaten Kediri* Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang

Suprianto, Wahyu. 2018. *Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor*.Skripsi . Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jakarta, Jakarta

### **Produk Hukum**

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2016-2021)

Peraturan Daerah No 39 tahun 2016 Tentang SKPD

Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2012 melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor : G/508/B.II/HK/2012 tentang persetujuan Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Rancangan Peraturan Daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017-2020 Kabupaten Pesisir Barat

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

### **Website**

Admin. 2015. *Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015*. [www.kpu.pesisirbarat.com](http://www.kpu.pesisirbarat.com). diakses pada 28 Agustus 2020, Jam 22.35 WIB.

Admin. 2020. *Jumlah Penduduk & Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Pesisir Barat*. <https://pesisirbaratkab.bps.go.id>. diakses pada 28 Agustus 2020, Jam 23.05 WIB.

Admin. 2021. *Data Pegawai BAPPEDA Kabupaten Pesisir Barat tahun 2021*. <https://bappeda.pesisirbaratkab.go.id/>. diakses pada 20 Maret 2021, Jam 19.55 WIB.

Admin. 2021. *Daftar Nama Pekon Kecamatan Pulau Pisang*. <https://pesisirbaratkab.bps.go.id>. diakses pada 27 Maret 2021, Jam 13.15 WIB.

Admin. 2014. *Monografi Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Dalam Angka Tahun 2014*. <https://pesisirbaratkab.bps.go.id>. diakses pada 29 Maret 2021, Jam 15.45 WIB.